



RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KOTA PASURUAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Renja Bakesbangpol, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka kebijakan, program, kegiatan pembangunan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan.

Mengingat pentingnya peranan Renja Bakesbangpol dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, maka diperlukan pedoman penyusunan Renja Bakesbangpol untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi bahwa dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis / operasional dalam penyusunan Renja Bakesbangpol.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan Rencana Kerja PD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan

dalam mewujudkan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang.

Pasuruan, 22 Juli 2022

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN**



Drs.H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pahlawan No. 28 C, Telp. (0343) 424019, Fax. (0343) 429707
Pasuruan 67126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

NOMOR 050/ 20 /423.206/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN
TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 ;
 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023
 - b. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
 - c. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
 - d. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak – pihak terkait guna penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

- e. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
- f. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan
- h. Melaporkan hasilnya pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 13 Januari 2022

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN**



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pahlawan No. 28 C, Telp. (0343) 424019, Fax. (0343) 429707
Pasuruan 67126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR 050/ 79 /423.206/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
KOTA PASURUAN
TAHUN 2023

- Menimbang :**
- c. bahwa Pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD sebagai pedoman perencanaan kegiatan pembangunan PD selama 1 (satu) tahun;
 - d. Bahwa Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/233/423.011/2022 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 mengamanatkan penetapan Renja PD melalui Keputusan Kepala PD;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 ;
 9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun berkenaan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 22 Juli 2022

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN**



Drs.H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA.....	ii
KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	46
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022	11
TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022	24
TABEL 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	27
TABEL 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	35
TABEL 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran yang lebih teknis dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Bakesbangpol). Renstra Bakesbangpol adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Rencana Kerja. Renja Bakesbangpol dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra Bakesbangpol, RPJMD dan RPJPD.

Penyusunan rancangan Renja Bakesbangpol merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bakesbangpol yang definitif. Penyusunan Renja Bakesbangpol dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Bakesbangpol; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja Bakesbangpol.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bakesbangpol mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Bakesbangpol dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bakesbangpol, evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bakesbangpol. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan pedoman penyusunan RAPBD dimana RAPBD tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja PD.

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun ke tiga periode tahun 2021 – 2026 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam permasalahan, tantangan, serta lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
 11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 12. Peraturan Walikota Pasuruan No. 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan

koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke tiga dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode tahun 2021 – 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala PD

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bakesbangpol, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Bakesbangpol dengan dokumen RKPD dan Renstra Bakesbangpol, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Renja Bakesbangpol.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bakesbangpol.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bakesbangpol serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol (program dan kegiatan) tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022) yang mengacu pada APBD tahun 2022 dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bakesbangpol berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol pada tahun – tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bakesbangpol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat tentang sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bakesbangpol dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bakesbangpol, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bakesbangpol, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bakesbangpol, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian mengenai proses yang dilakukan dalam mengkaji dan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, menjelaskan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota (bila sudah dilakukan).

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah kebijakan pemerintah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bakesbangpol.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. Serta dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Bakesbangpol juga cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 ini dapat kita lihat evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tabel 2.1. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui 6 (Enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2021 – 2026. Keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilannya, ada yang belum seluruhnya telah mencapai 100 % karena :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berlangsung pada tahun berjalan, yaitu tahun 2022;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berjalan pada tahun ketiga dari periode Renstra tahun 2021 – 2026;
3. Keunikan karakteristik budaya dan kultur masyarakat Kota Pasuruan.

Meskipun belum selesai tahun anggaran 2022, dalam Tabel 2.1, secara umum program dan kegiatan dari Sekretariat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Program dan kegiatan tahun anggaran 2023 pada ketiga bidang tidak seluruhnya sesuai dengan Renstra dikarenakan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kota Pasuruan serta adanya kegiatan dari PD lain yang bersifat lebih mendesak dan prioritas untuk dilaksanakan, sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, kegiatan – kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada di Renstra, yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan menjadi prioritas nasional guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta mempertimbangkan situasi dan kondisi Kota Pasuruan yang menuntut kejelian aparat pemerintah daerah juga berpengaruh pada

ketidaksesuaian dengan Renstra tersebut. Dalam kondisi demikian, pada akhirnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil kebijakan untuk menyesuaikan dengan segera melaksanakan program atau kegiatan baru tersebut.

Dari beberapa target kinerja yang telah dicapai, masih terdapat beberapa *outcome* yang belum maksimal pencapaiannya. *Outcome* lebih utama daripada sekedar *output*. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* telah tercapai. *Outcome* menggambarkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu sebagai hasil dari *output*, tentang apa yang ingin dicapai. Adapun faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja *outcome*, antara lain :

1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Adanya perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran kegiatan tahun berjalan karena perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh penyesuaian dengan situasi dan kondisi daerah.
3. Adanya keterbatasan kompetensi sumber daya aparatur.
4. Adanya efisiensi penggunaan anggaran karena menyesuaikan kebijakan dari pemerintahan yang baru sehingga membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan capaian Kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100	persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2	Laporan		2	2	100%	0 Laporan	-	0%
		Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	75	Orang		0	0	100%	50 Orang	42	84%
		Jumlah Tenaga PHL yang tersedia	2	Orang		1	1	100%	1 Orang	1	50%
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10	Laporan		10	10	100%	10 Laporan	2	20%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun	4	dokumen		4	4	100%	4 Laporan	1	25%
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKjIP yang disusun	2	dokumen		2	2	100%	2 Laporan	-	0%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang Diikuti	10	event		0	0	100%	2 Event	-	0%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya	14	Bulan		14	14	100%	14 Bulan	3	21%
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5	laporan		5	5	100%	5 Laporan	-	0%
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yan disusun	11	laporan		11	11	100%	11 Laporan	1	9%
		Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	11	laporan		11	11	100%	11 Laporan	1	9%
		Jumlah Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tercukupi	4	orang		4	4	100%	4 Orang	4	100%
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1	orang		0	0	100%	1 Orang	1	100%
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1	laporan		1	1	100%	1 Laporan	-	0%
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100	Persen		100	100	100%	100 Persen	-	0%
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang OPD yang Tersusun	12	Laporan		12	12	100%	12 Laporan	-	0%
		Jumlah Honor Pejabat Pengguna barang, Penata usahaan, Pengurus barang, PPKM, PPBJ dan PJPHP yang tercukupi	9	Orang		6	5	83%	6 Orang	-	0%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100	persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari - hari tertentu (pakaian dinas khusus ASN dilingkungan Bakesbangpol)	35	Buah							0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	5	dokumen		22	22	100%	5 Dokumen	5	100%
		Jumlah Honorarium tenaga pelaksana yang tercukupi	3	Orang		2	2	100%	2 Orang	2	67%
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia	30	kali		12	9	75%	6 kali	-	0%
		Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi cukai terhadap LSM dan Ormas	315	Orang		215	345	160%	315 Orang	-	0%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100	persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia menurut jenisnya	10	jenis		5	5	100%	5 Jenis	5	50%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Spanduk/Benner yang Tersedia	87	meter		44	17	39%	72 Meter	14	16%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	7	jenis		5	5	100%	5 Jenis	5	71%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2	jenis		2	2	100%	2 Jenis	2	100%
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	4	Jenis		3	3	100%	3 Jenis	3	75%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Yang Terlaksana	1280	OH		167	92	55%	256 OH	24	2%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen		100	100	100%	100 Persen	-	0%
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	100	Unit		2	1	50%	3 Unit	-	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	35	Unit		21	22	105%	2 Unit	-	0%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100	Persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	2	Jenis		2	2	100%	1 Jenis	1	50%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	12	Bulan		12	12	100%	12 Bulan	3	25%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya	35	Jenis		31	31	100%	31 Jenis	29	83%
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	5	Orang		4	4	100%	3 Orang	3	60%
		Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor yang tersedia	6	Orang		2	2	100%	5 Orang	3	50%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen		100	100	100%	100 Persen	25	25%
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	13	Unit		8	8	100%	8 Unit	8	62%
		Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang terselesaikan	13	Unit		8	8	100%	8 Unit	2	15%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	40	Unit		32	32	100%	23 Unit	5	13%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang Kebersihan Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya	25	Jenis		12	12	100%	12 Jenis	12	48%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
	Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Pemetaan Listrik untuk pembagian jaringan Listrik	2							-	0%
		Luas Bangunan yang di pelhara	750	M2		255	255	100%	255 M2	-	0%
8.01.01.2. 09. 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	20	Unit		9	9	100%	8 Unit	3	15%
8. 01. 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10	persen		10	10	100%	10 Persen	-	0%
8. 01. 02. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3	persen		3	3	100%	3 Persen	-	0%
8. 01. 02. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara	150	Orang		52	51	98%	110 Orang	-	0%
		Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	150	Orang		0	0	0	110 Orang	-	0%
		Jumlah Peserta Fasilitasi Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah	150	Orang		0	0	0	0 Orang	-	0%
		Jumlah peserta pemantapan forum Pembauran	100	Orang		0	0	0	0 Orang	-	0%
8. 01. 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20	Persen		20	19.4	97	20 Persen	-	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8. 01. 03. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	-	Persen		0	0	0	0 Persen	-	0%
8. 01. 03. 2. 01. 01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Musyawarah Kerja (Penyusunan Program Politik)	40	Orang							
8. 01. 03. 2. 01. 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah peserta Dialog Interaktif Partai Politik	75	Orang							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah										
8. 01. 03. 2. 01. 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (Orang)	75	Orang							
		Jumlah Lembaga yang dibina tentang Politik (lembaga)	75	lembaga							
		Jumlah Peserta Pemilih Pemula yang dibina (Orang)	375	orang							
		Jumlah peserta pembinaan demokrasi dan Hak Azasi Manusia (Lembaga)	75	lembaga							
		Jumlah peserta pembinaan demokrasi pada pemilih pemula							240 Orang	-	0%
8. 01. 03. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Partai Politik (Orang)	240	orang		51	40	78%			
		Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi masyarakat (lembaga)	0	lembaga		66	60	91%			
		Jumlah partai politik yang mengikuti Harmonisasi							100 Orang	-	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8. 01. 03. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta Asistensi, Bimbingan Teknis dan Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik	36	orang		27	27	100%			
		Frekuensi monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik (Lembaga)	16	lembaga							
		Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH)	9	lembaga		9	9	100%	9 Parpol	-	0%
		Jumlah PHL Kelembagaan politik	1	orang		1	1	100%	1 Orang	1	100%
8. 01. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	2	Persen		2	1.7	85%	2 Persen	-	0%
8. 01. 04. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40	Persen		40		0%	40 Persen	-	0%
8. 01. 04. 2. 01. 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti musyawarah rencana kerja (penyusunan program tahun depan)	75	Orang							
8. 01. 04. 2. 01. 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah peserta sarasehan Organisasi Masyarakat	120	orang		120	100	83%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pembinaan yang ditayangkan media elektronik (TV)	1	kegiatan		1	1	100%			
8. 01. 04. 2. 01. 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti jambore (orang) (Lembaga)		lembaga		80	85	106%			
		Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti kegiatan Cangkrukan	200	Orang		-	-	-	35 Orang	-	0%
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan (orang)	370	Orang		-	-	-	75 Orang	75	20%
		Jumlah Ormas / LSM yang mendapatkan Hibah	16	Lembaga		-	-	-	16 Lembaga	-	0%
		Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kemasyarakatan	1	Orang		-	-	-	1 Orang	1	100%
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan Covid (Lembaga)				-	-	-			
8. 01. 04. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti jambore Ormas	100	orang		-	-	-			
		Jumlah peserta sinkronisasi masalah sosial kemasyarakatan (kelurahan)	38	orang		-	-	-			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8. 01. 04. 2. 01. 05	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga yang disurvei	125	lembaga		-	-	-			
8. 01. 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20	Persen		20	12.3	62%	20 Persen	-	0%
8. 01. 05. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85	Persen		85		0%	85 Persen	-	0%
8. 01. 05. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi bagi Pengurus Komite Sekolah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Orang)				88	88	100%			
		Jumlah peserta fasilitasi bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Siswa)	140			-	-	-			
		Jumlah peserta fasilitasi bagi pengurus OSIS tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Siswa)	210			144	120	83%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
		Jumlah peserta Fasilitas bagi siswa SD tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Orang)				-	-	-			
		Jumlah peserta Fasilitas bagi Generasi Muda tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Orang)	190	orang		-	-	-			
		Jumlah peserta fasilitas Kerukunan Umat Beragama (Orang)	100	orang		68	68	100%	100 Orang	100	100%
		Jumlah peserta Fasilitas Tim PAKEM (Orang)	95	orang		72	72	100%	20 Orang	20	21%
		Jumlah peserta sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya (Orang)	160	orang		124	124	100%			
		Jumlah peserta fasilitas tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	120	Orang		-	-	-	120 Orang	30	25%
		Terfasilitasinya kegiatan koordinasi antar umat beragama (HIBAH)	1	Lembaga		1	1	100%	1 Lembaga	-	0%
8. 01. 05. 2. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah data yang diperoleh menurut jenisnya	5	data		-	-	-	5 data	-	0%
		Jumlah monitoring dan evaluasi	200	kali		-	-	-	40 kali	16	8%
		Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	40	Orang		-	-	-	40 Orang	-	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (TW I 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)
8. 01. 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75	Persen		75		0%	75 Persen	-	0%
8. 01. 06. 2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik	3	Persen		3		0%	3 Persen	-	0%
8. 01. 06. 2. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan	9883	Orang		3000		0%	9883 Orang	440	4%
		Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial	300	Orang		132		0%	250 Orang	-	0%
		Jumlah Peserta Koordinasi Pemantauan Orang asing	190	Orang		132		0%	100 Orang	-	0%
		Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah	175	Orang		96		0%	100 Orang	-	0%
		Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	190	Orang		132		0%	100 Orang	-	0%
		Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan	45	Orang		31		0%	45 Orang	-	0%
		Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH)	2	Lembaga		2	2	100%	2 Lembaga	-	0%
		Jumlah tenaga PHL fasilitasi stabilitas wilayah	2	Orang					2 Orang	2	100%
		Jumlah tenaga PHL Pembinaan Kewaspadaan dini masyarakat	1	Orang					1 Orang	1	100%
8. 01. 06. 2. 01. 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Forkopimda	2	kali							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tampak dalam Tabel 2.2. Terdapat 6 (Enam) indikator yang sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai standar nasional belum ditetapkan karena hal ini merujuk pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jawa Timur / Kota Pasuruan Tahun 2022

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase peningkatan jumlah orkesmas yang aktif			3%	3%	3%	3%	3%	2.64%	-	3%	3%	
2	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu			0%	0%	0%	85%	0%	0 %	-	0%	0%	
3	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan			20%	20%	20%	20%	20%	18.4%	-	20%	20%	
4	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD			90%	90%	90%	90%	90%	90%	-	90%	90%	
5	Nilai SAKIP PD			79	79	79	79	79	-	-	79	79	
6	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian prioritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023, antara lain :

- a. Ancaman terorisme dan radikalisme.
- b. Berkembangnya isu penistaan agama (SARA).
- c. Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba
- d. Rasa nasionalisme yang semakin luntur terutama di kalangan generasi muda.
- e. Gejolak yang terjadi pada masyarakat Kota Pasuruan akibat dari diberlakukannya kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan dengan adanya kepala daerah baru terpilih.

Dengan adanya isu-isu penting tersebut, beberapa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti akan dituangkan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan skala prioritas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik dalam kuantitas kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses pembandingan ini dilakukan sebagai dasar untuk menelaah dan mengevaluasi program dan kegiatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, usulan mana yang merupakan skala prioritas, dan besar anggaran yang dibutuhkan dalam kerangka efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan yang tepat sesuai pada sasaran seperti yang tercantum dalam Tabel 2.3

Pada Tabel 2.3 tersebut dapat dianalisa bahwa untuk program dan kegiatan rutin pada rancangan awal RKPD terjadi beberapa perubahan, baik penambahan maupun pengurangan kegiatan hasil dari analisis kebutuhan. Sedangkan ketiga bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami penghapusan dan penggabungan beberapa kegiatan serta kenaikan pagu anggaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan APBD Pemerintah Kota Pasuruan sehingga lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang lebih penting dan bersifat mendesak, mempertimbangkan target capaian program yang belum tercapai seluruhnya dalam upaya terpenuhinya Renstra Bakesbangpol, serta mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan esensi dari masing-masing kegiatan tersebut.

Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, untuk keseluruhan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pagu indikatif yang dianggarkan pada awalnya sejumlah Rp. 7,966,020,332.00 yang kemudian direduksi menjadi sejumlah Rp. 11,245,474,124.00 dengan 6 (enam) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan, 32 Sub Kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Jawa Timur / Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar 1 dari 8

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4,445,720,242	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	4,408,907,944	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	62,570,700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	60,780,800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	50,242,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	49,092,360	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	1,709,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	1,687,940	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	10,619,300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	10,000,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	3,433,919,736	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	3,433,301,766	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	3,342,124,866	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	3,342,124,866	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	4,064,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	4,063,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11 Laporan	86,613,570	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11 Laporan	85,997,200	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11 dokumen	1,116,900	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11 Laporan	1,116,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	87,560,196	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	45,612,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	87,560,196	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	45,612,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	59,827,700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	40,085,880	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	40,086,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	40,085,880	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	19,741,700						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	230,217,790	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	227,529,060	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,050,090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,240,700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,160,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	21,297,360	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	19,155,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2,358,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,257,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	2,358,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13,437,900	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	26,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	191,157,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	171,233,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100%	66,850,700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100%	163,396,800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	29,835,300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	147,666,700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	37,015,400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	15,730,100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100%	265,145,758	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100%	245,351,638	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	5,495,600						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	70,227,308	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	70,227,308	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	189,422,850	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	175,124,330	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	239,627,662	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	192,850,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	135,678,298	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	96,900,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	14,863,624	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	14,850,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 unit	82,431,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 unit	75,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	6,654,540	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	6,100,000	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10%	33,826,300	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10%	537,138,900	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	33,826,300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	537,138,900	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 orang	33,826,300	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1700 orang	537,138,900	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	20%	951,129,090	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	20%	1,301,648,180	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pasuruan	Jumlah pemilih pemula yang dibina	510 orang	951,129,090	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pasuruan	Jumlah pemilih pemula yang dibina	510 orang	1,301,648,180	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 dokumen	85,251,130	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 dokumen	85,250,560	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	39 dokumen	687,571,560	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	39 dokumen	706,591,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 orang	178,306,400	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2300 orang	509,805,920	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	2%	251,086,900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	2%	243,101,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40%	251,086,900	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40%	243,101,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	106,525,400	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	101,108,400	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 orang	109,244,900	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang	106,681,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	35,316,600	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	35,310,800	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	20%	334,708,600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	20%	794,280,100	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	85%	334,708,600	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pasuruan	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	85%	794,280,100	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160 orang	316,783,400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1750 orang	785,356,700	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	17,925,200	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	8,923,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik yang dimediasi	75%	1,949,549,200	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase konflik yang dimediasi	75%	3,960,398,000		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	1,949,549,200	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	3%	3,960,398,000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6813 Orang	1,949,549,200	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.819 Orang	3,960,398,000		
TOTAL					7,966,020,332	TOTAL					11,245,474	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

Jika merujuk pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, sampai dengan saat ini belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan karena program dan kegiatan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut lebih bersifat sentral dan vertikal yaitu desentralisasi dari pusat ke daerah karena menyangkut stabilitas keamanan dan politik yang mengacu pada amanat peraturan yang telah diundang-undangkan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Pasuruan

PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda	Kota Pasuruan	Untuk meningkatkan wawasan Kebangsaan dan rasa cinta tanah air bagi pemuda	1 x	
2	Kegiatan Dialog (Dialog bersama Mahasiswa) oleh Polres Pasuruan Kota sera bimpluh ke sekolah-sekolah	Kota Pasuruan	meningkatkan rasa persatuan bangsa, memperkuat, dan memelihara kerukunan antar mahasiswa dan pelajar	1 x	
3	Diklat bela negara bagi Ormas	Kota Pasuruan	Terciptanya suasana rukun, damai dan harmonis di lingkungan masyarakat	1 x	
4	Jambore Bela Negara	Kota Pasuruan	Sebagai sarana pembentukan sikap patriotisme, cinta tanah air dan nasionalisme	1 x	
5	Meningkatkan kesadaran pancasila kepada generasi pelajar/santri lewat workshop maupun pelatihan	Kota Pasuruan	Jumlah pelajar/santri yang hafal dan dapat menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta dapat menjalankan kehidupan sesuai nilai2 Pancasila	1 x	
6	Melakukan Penyuluhan Kepada UMKM Kota dengan memanfaatkan sektor teknologi untuk menggali potensi sektor kuliner dan wisata religi	Kota Pasuruan	Jumlah wilayah yang mengalami peningkatan di sektor kuliner dan pariwisata	1 x	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
7	Kegiatan perkumpulan sosial antara TNI - POLRI Organisasi Masyarakat serta Masyarakat agar terjalin kerukunan antar sesama sehingga meminimalisir terjadinya konflik	Kota Pasuruan	Meningkatnya kerukunan di semua lapisan masyarakat	1 x	
8	Sosialisasi Orientasi Bagi Siswa SMP dan SMA terkait Dunia Politik secara Intens	Kota Pasuruan	Peningkatan siswa yang paham terkait dunia politik	1 x	
9	Sosialisasi / Rembug bareng dari Tingkat RT tentang Kebaikan Kemajuan Wilayah	Kota Pasuruan	Jumlah Wilayah yang mengalami kemajuan di sektor ekonomi, sosial dan budaya	1 x	
10	Melaksanakan dan Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat tentang pengertian terorisme dan Radikalisme	Kota Pasuruan	Jumlah masyarakat yang paham pengertian dan bahaya akan tindakan terorisme	1 x	
12	Pendidikan Politik, Sosialisasi pemilu, Pengenalan dan diseminasi Pemilu 2024 bagi Ormas	Kota Pasuruan	Jumlah Ormas yang mengikuti pendidikan politik	1 x	
13	Kegiatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) ke sekolah SD, SMP dan SMA	Kota Pasuruan	Jumlah pelajar yang paham tentang pentingnya wawasan P4GN	1 x	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (RPJMN 3), tema pembangunan nasional adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Secara garis besar, rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. Yang dimaksud dengan pembangunan yang berkualitas adalah :

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
2. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem, menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing – masing yang diorientasikan melalui

pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan Kebijakan Kota Pasuruan adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu pada kebijakan nasional, selain juga mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kota Pasuruan dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan stabilitas wilayah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Provinsi Jawa Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berusaha mensinergikan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah tersebut dengan menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang guna mendukung program pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah meningkatnya stabilitas wilayah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya. Dalam hal ini, sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Meningkatnya kerukunan hidup berbangsa dan bermasyarakat
2. Meningkatnya kehidupan berbangsa dan berpolitik yang berazaskan Pancasila dan demokrasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dan dikoordinasikan dengan PD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program merupakan implementasi dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah disusun. Penyusunan program dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan mempertimbangkan ***skala prioritas dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi bidang – bidang***, yang selanjutnya akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, antara lain :

1. Pencapaian visi Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri, dengan misi sebagai berikut :
 - a. meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau;
 - b. meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
 - c. menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif;
 - d. meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak;
 - e. meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik;
 - g. meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial.
2. Ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerja sama intelkam.

3. Ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi.
4. Harmonisasi hubungan antar lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
5. Kondisi sosial politik masyarakat.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel 4.1, penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan terfokus di lingkungan Kota Pasuruan karena merujuk pada fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain memfasilitasi pembinaan kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Pasuruan. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di luar Kota Pasuruan lebih difokuskan pada kesuksesan kegiatan karena jika kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam kota, para peserta dimungkinkan tidak dapat konsentrasi dan terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak terkait sehingga dikhawatirkan materi kegiatan tidak dapat terserap secara maksimal.

Dalam data yang tercantum pada Tabel 4.1 tersebut terdapat perbedaan jumlah program dengan yang telah tercantum di Renstra karena disesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Pasuruan.

Dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) pada perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp 11,550,670,332.- prakiraan maju rencana tahun 2024 diprediksi akan menelan biaya sebesar Rp 12,978,118,246.-. Nilai sejumlah tersebut merupakan prediksi tingkat inflasi di Indonesia sebesar 10 % pada tahun 2024. Dengan mengetahui besarnya anggaran pada prakiraan maju rencana tahun 2024, diharapkan dapat diantisipasi terpenuhinya ketersediaan dana oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam data yang tercantum pada Tabel 4.1 tersebut terdapat perbedaan jumlah program dengan yang telah tercantum di Renstra karena disesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Pasuruan.

Rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 terdapat 6 Program 13 Kegiatan 35 Sub kegiatan. Dengan kebutuhan dana (pagu indikatif) pada perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp 11,550,670,332.- prakiraan maju rencana tahun 2024 diprediksi akan menelan biaya sebesar Rp 12,978,118,246.-. Nilai sejumlah tersebut merupakan prediksi tingkat inflasi di Indonesia sebesar 10 % pada tahun 2024. Dengan mengetahui besarnya anggaran pada prakiraan maju rencana tahun 2024, diharapkan dapat diantisipasi terpenuhinya ketersediaan dana oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Jawa Timur / Kota Pasuruan**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar 1 dari 7

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				11,550,670,332	DAU			12,978,118,245
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	100%	4,455,720,242	DAU		100%	4,900,292,266
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	72,570,700	DAU		100%	78,827,770
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	10 dokumen	50,242,000	DAU		10 dokumen	55,266,200
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	3 laporan	1,709,400	DAU		3 laporan	1,880,340
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	2 laporan	20,619,300	DAU		2 laporan	21,681,230
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	3,433,919,736	DAU		100%	3,777,311,710
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	22 orang/bulan	3,342,124,866	DAU		22 orang/bulan	3,676,337,353

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pasuruan	11 laporan	4,064,400	DAU		11 laporan	4,470,840
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	11 laporan	86,613,570	DAU		11 laporan	95,274,927
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pasuruan	11 dokumen	1,116,900	DAU		11 dokumen	1,228,590
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	Kota Pasuruan	100%	87,560,196	DAU		100%	96,316,216
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	12 laporan	87,560,196	DAU		12 laporan	96,316,216
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Kota Pasuruan	100%	59,827,700	DAU		100%	65,810,470
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	5 dokumen	40,086,000	DAU		5 dokumen	44,094,600
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	40 orang	19,741,700	DAU		40 orang	21,715,870
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Kota Pasuruan	100%	230,217,790	DAU		100%	253,239,569
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 paket	2,050,090	DAU		1 paket	2,255,099
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 paket	2,160,000	DAU		1 paket	2,376,000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pasuruan	2 paket	19,155,600	DAU		2 paket	21,071,160
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 dokumen	2,257,200	DAU		12 dokumen	2,482,920
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 laporan	13,437,900	DAU		12 laporan	14,781,690

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 laporan	191,157,000	DAU		12 laporan	210,272,700
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Pasuruan	100%	66,850,700	DAU		100%	73,535,770
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	4 unit	29,835,300	DAU		4 unit	32,818,830
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Pasuruan	3 unit	37,015,400	DAU		3 unit	40,716,940
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Kota Pasuruan	100%	265,145,758	DAU		100%	291,660,334
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	2 laporan	5,495,600	DAU		2 laporan	6,045,160
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 laporan	70,227,308	DAU		12 laporan	77,250,039
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pasuruan	12 laporan	189,422,850	DAU		12 laporan	208,365,135
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kota Pasuruan	100%	239,627,662	DAU		100%	263,590,428
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pasuruan	8 unit	135,678,298	DAU		8 unit	149,246,128
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pasuruan	23 unit	14,863,624	DAU		23 unit	16,349,986
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	4 unit	82,431,200	DAU		4 unit	90,674,320
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pasuruan	12 unit	6,654,540	DAU		12 unit	7,319,994

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pasuruan	10%	283,826,300	DAU		10%	287,208,930
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan	3%	283,826,300	DAU		3%	287,208,930
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pasuruan	80 orang	283,826,300	DAU		80 orang	287,208,930
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Kota Pasuruan	20%	2,051,129,090	DAU		20%	2,146,241,999
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	Kota Pasuruan	510 orang	2,051,129,090	DAU		510 orang	2,328,661,346
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Pasuruan	10 dokumen	85,251,130	DAU		10 dokumen	93,776,243

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Pasuruan	39 dokumen	1,787,571,560	DAU		39 dokumen	1,856,328,716
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Pasuruan	80 orang	178,306,400	DAU		80 orang	196,137,040
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Kota Pasuruan	2%	251,086,900	DAU		2%	276,195,590
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Kota Pasuruan	40%	251,086,900	DAU		40%	276,195,590
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	80 orang	106,525,400	DAU		80 orang	117,177,940
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	40 orang	109,244,900	DAU		40 orang	120,169,390

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pasuruan	4 laporan	35,316,600	DAU		4 laporan	38,848,260
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	Kota Pasuruan	20%	334,708,600	DAU		20%	368,179,460
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	Kota Pasuruan	85%	334,708,600	DAU		85%	368,179,460
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pasuruan	160 orang	316,783,400	DAU		160 orang	348,461,740
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pasuruan	1 Laporan	17,925,200	DAU		1 Laporan	19,717,720
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang dimediasi	Kota Pasuruan	75%	4,174,199,200	DAU		75%	5,000,000,000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Kota Pasuruan	3%	4,174,199,200	DAU		3%	5,000,000,000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pasuruan	6963 Orang	4,174,199,200	DAU		6963 Orang	5,000,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) adalah penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat program kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja tahun 2023 merupakan perencanaan program dan kegiatan tahun ke empat dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021 – 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang sedang dalam proses dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan masih perlu ditingkatkan koordinasi yang efektif dan efisien dari pelaksana program dalam rangka mewujudkan tim yang solid demi kelancaran dan kesuksesan program dan kegiatan tersebut. Untuk ketersediaan dana yang kurang sesuai dengan kebutuhan menjadi kendala tersendiri yang mana dengan keterbatasan dana, kegiatan harus tetap terlaksana sesuai dengan tujuan dan tepat pada sasaran. Selain itu, adanya beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik kegiatan berkelanjutan yang terpaksa dihapus maupun kegiatan baru yang harus segera dilaksanakan perlu disikapi secara bijaksana oleh pelaksana program / kegiatan.

Mengacu pada catatan penting di atas, maka perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang beserta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab demi terpenuhinya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026 ;
3. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengacu pada RKPD Kota Pasuruan dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, RPJMD dan RPJPD Kota Pasuruan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan pagu indikatif PD Tahun 2023.

Dari uraian di atas, rencana tindak lanjut yang dibutuhkan antara lain perlu adanya evaluasi dan perencanaan terhadap program/kegiatan agar pelaksanaan berikutnya lebih matang, peningkatan koordinasi intern dari para pelaksana kegiatan, dan penambahan jumlah pagu indikatif untuk mengantisipasi lonjakan harga dalam rangka inflasi dengan menyesuaikan jenis kegiatan. Selain itu, perlu dikaji ulang untuk lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga program dan kegiatan pada perencanaan berikutnya selaras dengan visi dan misi tersebut.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2023 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas – tugas yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

Pasuruan, 22 Juli 2022

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a cursive flourish.

Drs.H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013